

11

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 591/Illmu Politik

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PROGRAM STUDI



PENGARUH SISTEM PEMILU TERHADAP REKRUTMEN POLITIK
DAN KETERPILIHAN CALEG

(Studi Kasus Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Kabupaten Sleman Dalam Pemilu 2014)

PENGUSUL

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIDN : 05220869001

Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si
NIDN : 05214126802

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

OKTOBER 2016

HALAMAN PENGESAHAN

PENELITIAN UNGGULAN PROGRAM STUDI

Judul Penelitian : Pengaruh Sistem Pemilu Terhadap Rekrutmen Politik dan Keterpilihan Caleg (Studi Kasus Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) Kabupaten Sleman Dalam Pemilu 2014)

Ketua Peneliti :

Nama : Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.

NIDN : 0522086901

Jabatan Fungsional : Lektor

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Nomor HP : 081328723540

Alamat surel (e-mail) : titin_p_widodo@yahoo.com

Anggota Peneliti :

Nama : Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si

NIDN : 05214126802

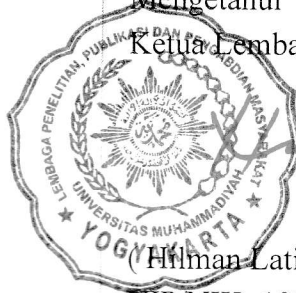
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp 20.000.000,-

Biaya Keseluruhan : Rp 20.000.000,-

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian UMY



(Hilman Latief, S.Ag., MA, Ph.D)
NIP/NIK: 19750912200004113033

Yogyakarta 30 September 2016
Ketua Peneliti,

(Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si)
NIP/NIK: 163.038

PRAKATA

Penelitian ini berjudul pengaruh sistem pemilu terhadap keterpilihan caleg, studi tentang rekrutmen politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sleman pada Pemilu 2014. Penelitian ini berlatar belakang pada permasalahan besarnya prosentase caleg terpilih di PDIP Kabupaten Sleman yang berasal dari nomor urut bawah dalam pemilu 2014.

Terima kasih kepada LP3M UMY yang memungkinkan bagi kelancaran studi dan penelitian ini dengan dana Hibah Unggulan Program Studi yang diberikan. Semoga hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu, khususnya ilmu politik dan bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia

Yogyakarta, 30 September 2016

Peneliti

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Daftar Isi	
Ringkasan	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Kelayakan Teknis	3
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III: METODE PENELITIAN	9
A. Metode Penelitian	9
B. Pemanfaatan Hasil	10
C. Strategi Pelembagaan Pemilu Sebagai Sarana Memilih Pemimpin.....	11
D. Luaran Penelitian	11
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	12
A. Proses Pencalonan dalam Partai Politik	13
B. Proses Pemilihan oleh Masyarakat dalam pemilu	19
C. Pengaruh Sistem Pemilu	28
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	31
A. Kesimpulan	31
B. Saran	31
Daftar Pustaka	32

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Prosentase Keterpilihan Caleg Berdasar Nomor Urut Caleg di Kabupaten Sleman dalam Pemilu 2014
- Tabel 1.2 : Tingkat Keterpilihan Caleg Berdasar Nomor Urut Pada Masing-Masing Partai di Kabupaten Sleman dalam Pemilu 2014
- Tabel 4.1. : Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sleman per Partai Politik
- Tabel 4.2. : Daftar Anggota DPRD dari PDIP berdasar Tingkat Pendidikan dan Agama
- Tabel 4.3. : Daftar Caleg PDIP Kabupaten Sleman dalam Pemilu 2014
- Tabel 4.4. : Daftar Anggota DPRD Kabupaten Sleman Terpilih dalam pemilu 2014
- Tabel 4.5. : Tingkat keterpilihan caleg berdasarkan nomor urut di PDIP Kabupaten Sleman
- Tabel 4.6. : Daftar Perolehan Caleg per Dapil
- Tabel 4.7. : Daftar Caleg Terpilih berdasar Perolehan Suara

RINGKASAN

Penelitian ini mengenai pengaruh sistem pemilu terhadap rekrutmen politik dan keterpilihan caleg, studi tentang rekrutmen politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sleman pada Pemilu 2014. **Tujuan jangka panjang** penelitian ini adalah 1) tercapainya penjelasan teoritis mengenai pengaruh sistem pemilu terhadap rekrutmen politik dan keterpilihan caleg, khususnya pada PDIP Kabupaten Sleman. **Target khusus** yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu 1) melakukan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan caleg; 2) mengungkap mekanisme rekrutmen caleg pada PDIP Kabupaten Sleman; 3) melakukan kajian ikatan caleg dengan partai politik dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka dalam pemilu 2014; 4) melakukan evaluasi sistem pemilu, khususnya dari perspektif rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik. **Metode penelitian** yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif, *exploratory research*. Teknik pengumpulan data menggunakan *depth interview* dan dokumentasi. *Depth interview* dilakukan kepada para informan yang terdiri dari pengurus partai politik dan caleg baik yang terpilih maupun tidak terpilih dalam pemilu 2014 dari PDIP Kabupaten Sleman. Validitas data dilakukan dengan cek dan ricek atas data-data yang diperoleh dengan metode triangulasi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemilu proporsional yang dilaksanakan di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Pada pemilu pertama era reformasi tahun 1999, menggunakan sistem pemilu proporsional dengan daftar tertutup sebagaimana pada masa Orde Baru. Pada pemilu tahun 2004, sistem pemilu proporsional yang digunakan dengan menggunakan daftar terbuka, dan pada pemilu 2009 dan 2014 selain menggunakan sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka juga menggunakan mekanisme suara terbanyak.

Dengan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dan suara terbanyak ini membawa konsekuensi politis, di mana peran caleg menjadi lebih besar dan besarnya peran caleg dalam proses pencalonan akan memperlemah ikatan partai dengan caleg¹. Dalam pemilu 2014, masyarakat yang memilih caleg sebesar 70 % sedangkan yang memilih partai sebesar 30 %. Dengan sistem daftar terbuka, peluang caleg untuk duduk di parlemen tidak ditentukan oleh nomor urut, namun ditentukan oleh tingkat dukungan masyarakat kepadanya. Meskipun demikian, biasanya partai menempatkan pengurus partai yang sudah dikenal masyarakat dalam daftar nomor urut atas (nomor urut 1-3). Dalam pemilu 2014, dari kajian yang dilakukan oleh Puskapol UI, keterpilihan nomor urut atas masih cukup besar yaitu sebanyak 83,56 %, dengan rincian caleg terpilih yang berasal dari nomor urut 1 sebesar 62,14 %, nomor urut 2 sebesar 16,96 % dan nomor urut 3 sebesar 4,46 %.

Caleg terpilih di Kabupaten Sleman, sebanyak 64 % berasal dari nomor urut 1 sampai 3 dengan rincian nomor urut 1 sebesar 38 %, nomor urut 2 sebesar 20 % dan nomor urut 3 sebesar 8 %, seperti dalam tabel berikut:

¹ Lihat dalam Reuven Y Hazan dan Gideon Rahat, 2010, *Democracy within Parties, Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*, Oxford University Press, New York, hal. 9.

Tabel 1.1. Prosentase Keterpilihan Caleg Berdasar Nomor Urut Caleg di Kabupaten Sleman dalam Pemilu 2014

No	Caleg Terpilih	Jumlah	Prosentase
1.	No. Urut 1	19	38.00 %
2.	No .Urut 2	10	20.00 %
3.	No. Urut 3	4	8.00 %
4.	No Urut \geq 4	17	34.00 %
	Jumlah	50	100.00 %

Sumber: Diolah dari data DCT dan data Anggota DPRD Kab. Sleman 2014.

Di Kabupaten Sleman, tingkat keterpilihan caleg yang berada pada nomor 4 atau lebih sebesar 34 %, lebih tinggi daripada keterpilihan caleg pada tingkat nasional sebesar 16,44 %.

Tabel 1.2: Tingkat Keterpilihan Caleg Berdasar Nomor Urut Pada Masing-Masing Partai di Kabupaten Sleman dalam Pemilu 2014

No	Partai	No urut 1-3	%	Caleg no urut >3	%	Jumlah Caleg terpilih
1.	Gerindra	5	71.43	2	28.57	7
2.	Nasdem	4	80.00	1	20.00	5
3.	PKS	6	100.00	0	0.00	6
4.	Golkar	4	100.00	0	0.00	4
5.	PDIP	2	16.67	10	83.33	12
6.	PAN	4	66.67	2	33.33	6
7.	PKB	4	80.00	1	20.00	5
8.	PPP	3	75.00	1	25.00	4
9.	Demokrat	1	100.00	0	0.00	1
	Jumlah	33	66.00	17	34.00	50

Sumber: Diolah dari data DCT dan data Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014

Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa tingkat keterpilihan caleg pada nomor bawah di Kabupaten Sleman lebih tinggi daripada di tingkat nasional. Dari 9 partai yang memperoleh kursi di DPRD, tingkat keterpilihan caleg pada nomor urut bawah (nomor 4 ke bawah) tertinggi terjadi pada PDIP yaitu sebesar 83.33 %. Dari 12 kursi yang diperoleh PDIP, hanya 1 orang dengan nomor urut caleg 2, satu orang dengan nomor urut caleg 3, dan 10 orang dengan nomor urut caleg 4 atau lebih. Dengan sistem pemilu proporsional suara terbanyak memang memungkinkan bagi setiap caleg untuk memperoleh kursi di DPR/DPRD, tanpa tergantung kepada nomor urut caleg. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya, nomor urut caleg tidak mempengaruhi keterpilihan caleg terutama bagi caleg-caleg yang cukup

dikenal masyarakat atau berasal dari keluarga politik yang cukup dikenal publik. Caleg yang berasal dari keluarga politik bahkan memperoleh suara terbanyak, meski ditempatkan pada nomor urut bawah².

Namun demikian, biasanya kader partai atau aktifis partai diletakkan pada nomor urut atas, sehingga banyaknya caleg terpilih yang berasal dari nomor urut bawah yang biasanya bukan merupakan kader partai akan mempengaruhi ikatan caleg dengan partai politik, dan lebih lanjut akan mempengaruhi kinerja partai di lembaga perwakilan. Apalagi berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Formappi tentang anatomi caleg dalam pemilu 2014, hanya 33 % caleg yang merupakan kader partai, 49 % bukan merupakan kader partai dan 18 % tanpa keterangan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaruh sistem pemilu terhadap rekrutmen politik dan keterpilihan caleg pada PDIP Kabupaten Sleman dalam Pemilu 2014?

C. Kelayakan Teknis

Penelitian ini merupakan penelitian yang menarik dan sangat urgen mengingat banyaknya anggota legislatif yang bukan merupakan kader partai akan mempengaruhi fungsi partai politik, padahal partai politik merupakan elemen yang sangat penting dalam pembangunan demokrasi. Banyaknya fenomena politik kekerabatan, money politik, dan semakin kuatnya ketidakpercayaan publik kepada politisi menjadikan evaluasi terhadap sistem pemilu dan rekrutmen politik menjadi sangat penting. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kajian teoritis mengenai sistem pemilu, rekrutmen politik dan keterpilihan caleg.
2. Memberikan masukan kepada pemerintah mengenai evaluasi pelaksanaan pemilu 2014.
3. Memberikan masukan kepada partai politik mengenai rekrutmen politik.

² Titin Purwaningsih, 2015, *Politik Kekerabatan dalam Politik Lokal di Sulawesi Selatan, Studi tentang Rekrutmen Politik pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

State of the art dalam bidang Ilmu Politik, khususnya studi tentang pelebagaan partai politik yaitu tentang sistem pemilu, rekrutmen politik, dan keterpilihan caleg dapat dideskripsikan melalui tinjauan pustaka berupa **buku dan jurnal ilmiah yang relevan dan terkini** sebagai berikut.

Fungsi inti partai politik adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan proses politik di mana partai berusaha untuk mendudukkan orang-orangnya dalam jabatan politik. Rekrutmen politik ini dilakukan sebagai sarana representasi dan agregasi kepentingan rakyat, yang dilakukan melalui sosialisasi politik dan komunikasi politik, sehingga pemerintahan yang dibentuk memperoleh legitimasi dan dukungan rakyat dengan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Rekrutmen politik yang dilakukan oleh setiap partai berbeda satu dengan lainnya, baik dalam mekanisme penjangkaran, kriteria seleksi, maupun penentuan caleg. Namun secara umum, dalam rekrutmen politik terdapat unsur-unsur seperti yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Phillip Althoff, antara lain :³

1. Penyediaan rekrutmen politik terhadap Caleg, merupakan tahapan awal yang dilakukan Partai Demokrat dalam pengrekrutan Caleg melalui:
 - a. Mekanisme rekrutmen Caleg yang dilakukan Partai.
 - b. Waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmen Caleg.
 - c. Sarana rekrutmen Caleg.
2. Kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/ kriteria Caleg untuk memilih dan menetapkan calon legislatif oleh Richard.S Katz dan William Crotty, antara lain yaitu
 - a. Usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup yakni 21 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif. Usia adalah hal yang penting karena dapat menentukan tingkat analisa seseorang dalam menghadapi

³ Richard.S Katz dan William Crotty, *Handbook of Party Politics*, London: Sagen Publications. Hal: 89-91

masalah. Biasanya faktor usia juga dapat mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat.

- b. Popularitas, yakni seorang calon adalah orang yang dikenal masyarakat luas dan memiliki reputasi yang baik.
 - c. Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif harus mempunyai tingkat pendidikan yang bagus minimal sarjana agar calon tersebut dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
 - d. Keuangan dan finansial, hal ini adalah suatu syarat yang juga dianggap penting, seorang calon anggota legislatif haruslah mempunyai dana yang cukup besar yang digunakan ketika mengadakan kampanye.
 - e. Akseptabilitas, yakni penerimaan masyarakat terhadap seorang calon anggota legislatif. Penerimaan ini akan muncul ketika masyarakat merasa calon tersebut adalah orang-orang yang benar-benar dapat menyuarakan kepentingannya. Kapabilitas, yakni kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian merumuskan aspirasi tersebut terhadap bentuk pernyataan yang jelas dan menyampaikan hasil rumusan itu kepada masyarakat.
3. Kontrol rekrutmen politik Caleg, Adapun pelaksanaan kontrol rekrutmen politik dilakukan pada⁴:
- a. Bakal calon Legislatif dari internal partai.
 - b. Bakal calon Legislatif dari eksternal partai

Apa yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff tersebut sebenarnya merupakan proses seleksi kandidat (*candidacy*). Proses seleksi kandidat ini merupakan salah satu bagian dari unsur yang harus diperhatikan dalam rekrutmen politik, selain selectorate (yang menyeleksi), desentralisasi dan juga model pemoninasian kandidat sebagaimana yang dikemukakan oleh Reuven Y Hazan. Terdapat 4 aspek dalam seleksi kandidat menurut Reuven Y. Hazan⁵, antara lain :

1. *Candidacy*

Candidacy menjelaskan tentang siapa yang dapat dicalonkan atau ditetapkan sebagai kandidat dari sebuah partai. Proses ini dikualifikasikan dalam dua tingkat yaitu inklusifitas dan eksklusifitas. Dalam inklusifitas, setiap orang dapat

⁴ Michael Rush, Phillip Althoff, Op.Cit. hal: 247

⁵ Reuven Y. Hazan, 2002, Chapter 5 "Candidate Selection" dalam *Comparing Democracies 2 New Challenges in The Study of Elections and Voting*, Hal. 111-115.

mencalonkan diri menjadi kandidat dalam partai, tidak hanya terbatas pada anggota partai ataupun pengurus partai saja, namun terbuka bagi semua warga Negara. Sementara dalam eksklusifitas ada beberapa kondisi yang membatasi dan menutup ruang hak seseorang maupun anggota kader partai untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat, sehingga pola rekrutmen ini bersifat tertutup dan tidak demokratis.

2. *Selectorate*

Selectorate adalah proses yang terkait sebuah lembaga partai yang dibentuk dalam menyeleksi kandidat. Lembaga tersebut berkaitan dengan berapa banyak orang yang terlibat dalam menentukan proses seleksi. Terdiri dari anggota internal partai tertentu atau melibatkan warga Negara secara luas. Ketika warga Negara dilibatkan dalam proses seleksi kandidat maka pola tersebut dapat diklasifikasikan sebagai model seleksi inklusif. Sebaliknya, seleksi eksklusif yaitu ketika seleksi kandidat ditentukan oleh pimpinan atau elit partai saja. Lebih rinci hal ini berkaitan dengan seberapa besar peran pimpinan partai menentukan hasil seseorang dalam proses pencalonan.

3. *Decentralization*

Proses ini menjelaskan persoalan lingkup pengambilan keputusan terkait persoalan derajat desentralisasi dan sentralistik. Ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi pada tataran pusat (nasional) maka metode ini disebut derajat sentralistik. Sebaliknya ketika seleksi kandidat dilakukan oleh penyeleksi partai pada tataran local dan berlangsung secara otonom maka disebut dengan metode desentralisasi.

4. *Voting versus Appointment*

Terdapat dua model dalam penominasian. Pertama, model sistem pemilihan (*voting*) yaitu penominasian berdasarkan suara dimana semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorangpun dapat mengubah daftar komposisi. Kedua, model sistem penunjukan dimana penentuan calon ditunjuk tanpa menggunakan prosedur pemilihan.

Jasi, proses seleksi kandidat merupakan aspek penting dalam rekrutmen politik. Seleksi kandidat merupakan pertarungan dalam partai politik untuk menentukan kandidat-kandidat yang akan berkompetisi dengan kandidat dari partai-partai lain dalam rekrutmen politik. Dalam proses seleksi kandidat, partai politik menentukan calon-calon yang mempunyai elektabilitas dan popularitas untuk

memperoleh dukungan masyarakat. Proses seleksi kandidat merupakan proses penting⁶ yang akan menentukan performa partai dalam pemilu yang lebih lanjut akan berpengaruh pula dalam performa partai dalam pemerintahan ataupun lembaga perwakilan. Dalam perspektif fungsi partai politik, partailah yang semestinya menentukan dalam proses seleksi kandidat, sesuai dengan garis kebijakan partai. agar kandidat yang dipilih oleh partai mempunyai ikatan yang kuat dengan partai politik dan bertindak sesuai garis kebijakan partai. Namun dalam perkembangannya. ketidakstabilan tingkat dukungan masyarakat kepada partai politik mendorong partai untuk melakukan strategi baru dalam memperluas dukungan, antara lain dengan cara rekrutmen politik secara terbuka dan lebih demokratis⁷.

Studi tentang rekrutmen politik yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada model analisis dari Morgenstern dan Siavelis⁸ dan Norris⁹. dan penelitian ini memfokuskan pada variabel sistem pemilu sebagai variabel yang mempengaruhi rekrutmen politik.

Sistem pemilu meliputi berbagai detail yang mengatur serangkaian issue, dari bagaimana kandidat dinominasikan sampai dengan bagaimana kursi dialokasikan¹⁰. Sistem pemilu proporsional daftar terbuka yang dipadu dengan suara terbanyak memberikan peran yang lebih besar kepada kandidat dalam proses rekrutmen politik dan upaya kemenangan pemilu. Besarnya peran kandidat ini akan mempengaruhi fungsi partai.

Jika partai tidak berfungsi sebagai mekanisme penyaring, kemudian aktor-aktor kunci dalam proses kandidasi menjadikan diri mereka sebagai kandidat yang akan memobilisasi dukungan secara langsung. keseluruhan proses seleksi

⁶ Reuven Y. Hazan dan Gideon Rahat, *Op.Cit.* hal. 4.

⁷ Paul Pennings dan Reuven Y Hazan, 2001, Democratizing Candidate Selection, Causes and Consequences, dalam jurnal *Party Politics*, Vol. 7 No. 3, pp. 267-275, Sage Publications.

⁸ Peter M. Siavelis dan Scott Morgenstern, *Op.Cit.*, hal. 12 – 17. Menurut Siavelis, terdapat dua variabel dalam analisis rekrutmen politik yaitu variabel hukum yang terdiri dari sistem pemilu, organisasi geografis, dan kekuatan lembaga legislatif, dan variabel partai politik yang terdiri dari inklusifitas, desentralisasi serta organisasi dan keuangan partai.

⁹ Pippa Norris, *Passages to Power, Legislative Recruitment in Advanced Democracies*, Cambridges University Press, 1997, hal 1 – 14. Menurut Norris, terdapat 4 level analisis rekrutmen politik yaitu level sistem politik (termasuk sistem pemilu), level demokrasi internal partai, kandidat dan selektor.

¹⁰ Scott Mainwaring, 1990: *Politicians, Parties and electoral System: Brazil in Comparative Perspective*, working paper, Kellogg Institute.

akan dikendalikan oleh para kandidat dan bukan oleh partai. Hasilnya dapat memperlemah ikatan dan disiplin partai yang akan menurunkan kemampuan partai dalam melaksanakan fungsinya sebagai basis yang stabil bagi proses politik dan dalam melaksanakan fungsinya secara efektif di parlemen¹¹.

Hal senada dikemukakan oleh Scott Mainwaring¹² bahwa sistem pemilu proporsional daftar terbuka menimbulkan rivalitas antar kandidat, menciptakan disharmoni di antara kolega dan merusak kohesi partai. Kohesi partai ini merupakan hal yang sangat penting karena secara langsung akan berpengaruh kepada kualitas proses politik yang demokratis¹³.

¹¹ Reuven Y Hazan dan Gideon Rahat, *Op.Cit.*, hal 9.

¹² Scott Mainwaring, *Op.Cit.*

¹³ Paul Pennings dan reuven Y Hazan, *Op.Cit.*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, *exploratory research*¹⁴. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yaitu rekrutmen politik pada PDIP dalam pemilu 2014. Teknik analisisnya adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis rekrutmen caleg PDIP dalam pemilu 2014 dan bagaimana keterpilihan caleg dalam pemilu tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada pengurus partai politik, dan para caleg PDIP baik yang terpilih maupun tidak terpilih menjadi anggota legislatif, yang dilakukan dengan metode *snow-ball*.

Matriks Subyek dan Instrumen Penelitian

	Instrumen	Dokumentasi	Wawancara
Subyek			
Pengurus		1	3
Caleg/politisi		-	4
Penyelenggara Pemilu (KPUD)		2	-

Dari matriks tersebut, terdapat 4 instrumen penelitian yaitu:

1. Studi dokumentasi dari pengurus partai politik: peraturan-peraturan/kebijakan partai, data caleg, mekanisme rekrutmen caleg.
2. Studi dokumentasi dari KPUD: Daftar caleg, perolehan suara dan perolehan kursi dalam pemilu 2014.
3. Wawancara dengan pengurus partai politik: mekanisme rekrutmen politik, mekanisme pencalonan, penentuan nomor urut caleg, peran partai dalam rekrutmen politik, peran partai dalam mengontrol caleg terpilih.
4. Wawancara dengan caleg: mekanisme pencalegan, pelaksanaan kampanye, tim sukses, pendanaan kampanye, peran partai dalam proses rekrutmen politik, peran partai setelah mereka menjadi anggota DPRD

¹⁴ J. Creswell dan Plano Clark, *Designing and Conducting Mix Methods Research*, Sage Publications, 2011, hal. 68 – 95.

Terkait dengan tujuan penelitian, matriks tujuan penelitian dan instrumen penelitian sebagai berikut:

Tujuan Penelitian	Instrumen	Dokumentasi	Wawancara
Mengkaji pengaruh sistem pemilu terhadap rekrutmen politik dan keterpilihan caleg dalam pemilu 2014.		X	X
Mengungkap mekanisme internal partai politik di PDIP dalam rekrutmen politik dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Sleman.		X	X
Menganalisis pengaruh sistem pemilu terhadap ikatan caleg dengan partai politik.			X
Melakukan evaluasi pelaksanaan sistem pemilu, khususnya dari perspektif rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik			X

Metode analisis data adalah metode induktif. Analisis terkait dengan 3 proses yang saling terkait yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis data kualitatif dilakukan dalam setiap tahap sejak perancangan penelitian, pada waktu proses pengumpulan data dan setelah pengumpulan data akhir.

B. Pemanfaatan Hasil

Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bagaimana pengaruh system pemilu terhadap rekrutmen politik dan keterpilihan caleg. Rekrutmen politik melalui pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan berorientasi kepada kepentingan rakyat. Dari pengaruh system pemilu terhadap rekrutmen politik dan keterpilihan caleg pada PDIP dapat dilakukan evaluasi agar system pemilu dan rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik bisa meminimalisir distorsi antara tujuan pemilu dengan realitas caleg terpilih. Hasil dari penelitian ini juga bermanfaat bagi pembangunan partai politik sehingga partai politik sebagai elemen penting dalam pelaksanaan demokrasi bisa berfungsi lebih baik, tidak sekedar sebagai kendaraan politik bagi caleg untuk memperoleh kekuasaan.

Hasil dari penelitian ini bisa diperluas pada kasus partai yang lain dan pada pemilu tingkat provinsi maupun nasional, dan bisa diperdalam dengan kajian kinerja caleg terpilih di lembaga perwakilan sehingga bisa menjadi masukan mengenai system pemilu yang lebih baik yang bisa diterapkan di Indonesia yang bisa menghasilkan wakil rakyat yang lebih berorientasi kepada kepentingan rakyat.

C. Strategi Pelembagaan Pemilu sebagai sarana memilih pemimpin yang berkarakter

Karakter bangsa sangat dipengaruhi oleh karakter pemimpinnya, dan pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin yang berkarakter. Oleh karena itu, sangat penting melaksanakan pemilu yang berkualitas, melalui penerapan system pemilu yang lebih cocok dan bisa menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas. Hasil dari penelitian ini merupakan masukan bagi Pemerintah, penyelenggaran pemilu dan partai politik untuk menciptakan dan melaksanakan system pemilu dan rekrutmen politik yang lebih baik. Oleh karena itu, penyebarluasan hasil penelitian melalui diskusi-diskusi dengan para pengambil kebijakan dan actor-aktor yang terlibat dalam pemilu menjadi sangat penting. Bagi masyarakat secara umum, dari hasil penelitian ini bisa dilakukan pendidikan politik bagaimana memilih pemimpin melalui pemilu, baik secara teknis dalam pemilihan maupun substansi dalam memilih pemimpin yang berkarakter.

D. Luaran Penelitian

Ada 2 luaran penelitian ini yaitu :

1. laporan penelitian yang merupakan evaluasi terhadap sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak dan rekrutmen politik serta keterpilihan caleg.
2. Publikasi hasil penelitian pada jurnal terakreditasi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Pemilu 2014, PDIP Kabupaten Sleman meraih kursi terbanyak di DPRD, yaitu sebanyak 12 kursi atau 24 % dari seluruh anggota DPRD. Perolehan suara PDIP di Kabupaten Sleman ini lebih tinggi daripada perolehan suara nasional yang hanya sekitar 19 %. Daftar seluruh partai dapat dilihat dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sleman per Partai Politik

PARTAI	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	
	JML	%	JML	%	JML	%
PDIP	9	75.00	3	25.00	12	24.00
NASDEM	3	60.00	2	40.00	5	10.00
GERINDRA	5	71.43	2	28.57	7	14.00
PKS	6	100.00	0	0.00	6	12.00
PAN	4	66.67	2	33.33	6	12.00
GOLKAR	4	100.00	0	0.00	4	8.00
PKB	3	60.00	2	40.00	5	10.00
PPP	3	60.00	2	40.00	5	10.00
	37	74.00	13	26.00	50	100.00

Sumber: Olah Data

Selain perolehan kursi terbanyak di DPRD, jumlah anggota perempuan DPRD dari PDIP juga paling banyak yaitu 3 orang. Tentunya kedua capaian tersebut tidak terlepas dari proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh PDIP.

Dilihat dari agama dan tingkat pendidikannya, tercermin dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. Daftar Anggota DPRD dari PDIP berdasar Tingkat Pendidikan dan Agama

Tk. Pendidikan	Jumlah	%	Agama	Jumlah	%
SMA	4	33.33	Islam	8	66.66
S1	7	58.34	Katholik	2	16.67
S2	1	8.33	Protestan	2	16.67
Jumlah	12	100.00		12	100.00

Sumber: Olah data

Dilihat dari tingkat pendidikan anggota DPRD, sebagian besar adalah sarjana, dan sepertiganya lulusan SMA. Dilihat dari agamanya, anggota DPRD dari PDIP 2/3 beragama Islam, dan 1/3nya beragama Katholik dan Protestan.

Rekrutmen politik dalam Pemilu 2014

Rekrutmen politik sebagai fungsi partai politik dalam mendudukkan orang-orangnya dalam jabatan politik terdiri dari dua proses, yaitu proses pencalonan dalam partai politik dan proses pemilihan oleh masyarakat dalam pemilu. Oleh karena itu, pembahasan tentang pengaruh sistem pemilu dalam rekrutmen politik dan keterpilihan caleg akan dibahas dalam kerangka kedua proses tersebut sesuai dengan teori dari Reuven Y Hazan maupun Rush dan Uphoff.

A. Proses Pencalonan dalam Partai Politik

Rekrutmen di PDIP Kabupaten Sleman dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu tahap penjaringan, tahap penyaringan dan tahap penetapan caleg. Pada tahap penjaringan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan struktur kepengurusan partai seperti Pimpinan Anak Cabang (PAC) maupun pengurus ranting. Pada prinsipnya, proses penjaringan ini bertujuan untuk memperoleh calon sebanyak-banyaknya sehingga nantinya diseleksi dalam proses penyaringan. Dalam proses penjaringan ini terbuka bagi bakal calon anggota legislatif baik yang berasal dari kader partai maupun dari luar kader partai.

Proses rekrutmen caleg berpedoman pada Surat Ketetapan DPP PDIP No. 061/TAP/DPP/III/2013 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Penetapan dan Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2014. Dalam ketetapan tersebut memang dimungkinkan pencalonan yang berasal dari luar kader sebanyak-banyaknya 2 %, baik yang berasal dari tokoh masyarakat, simpatisan partai, pensiunan, pengusaha, dan sebagainya. Dengan memberikan ruang bagi bakal calon anggota legislative dari luar kader menunjukkan bahwa rekrutmen politik yang terjadi di PDIP bersifat terbuka. Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Sleman¹⁵:

“Untuk rekrutmen calon legislatif tahun 2014 itu kami buka secara bebas di masing-masing kecamatan, dimasing-masing kecamatan kami bebaskan untuk yang daftar baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dan tidaknya itu urusan mereka masing-masing, karena kita mengacu pada aturan Mahkamah Konstitusi yaitu suara terbanyak. Dengan aturan suara terbanyak tersebut maka dalam mencari massa itu saling tabrak-tabrakan itu wajar karena saling berebut massa....

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Kuswanto, Ketua DPC PDIP Kabupaten Sleman tanggal 7 April 2016 di Kantor DPC PDIP Kabupaten Sleman.

Dengan rekrutmen yang dilakukan secara terbuka memberikan peluang bagi calon non kader yang mempunyai popularitas maupun elektabilitas yang tinggi sehingga bisa memberikan kontribusi yang besar bagi perolehan suara partai. Dengan penjangkaran yang luas juga memberikan keleluasaan bagi partai untuk menyeleksi calon-calon terbaiknya dalam proses penyaringan. Proses penyaringan dilakukan dengan sejumlah test kepada bakal calon, antara lain:

- psikotes
- test bebas narkoba/prikotropika
- penilaian penugasan partai
- penilaian terhadap rekam jejak
- penilaian berdasar bobot skoring

Meskipun rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan memberikan peluang bagi bakal calon yang berasal dari non-kader, namun kriteria rekrutmen yang dilakukan berbeda antara bakal calon yang berasal dari kader dan non kader. Kriteria rekrutmen bakal calon yang berasal dari kader antara lain:

- Loyalitas: yang dilihat dari lama menjadi kader partai, keaktifan dalam kepengurusan partai dan keterlibatan dalam program-program partai
- Kapabilitas: yang meliputi rekam jejak, kepemimpinan, dan kemampuan komunikasi
- Akseptabilitas
- Kontribusi terhadap partai

Sedangkan kriteria rekrutmen bakal calon yang berasal dari non-kader terdiri dari:

- Pemahaman terhadap 4 pilar
- Tingkat ketokohan
- Tingkat elektabilitas
- Kemampuan menggalang pemilih
- Kemampuan dalam memperjuangkan aspirasi

Dari kriteria rekrutmen tersebut menunjukkan bahwa penjangkaran bakal calon yang berasal dari non kader lebih ditujukan untuk memperoleh dukungan suara dan juga untuk memenuhi kuota 30 % calon perempuan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Sleman¹⁶:

¹⁶ *Ibid.*

Dalam hal ini kenapa keterwakilan perempuan belum bisa sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, kami menyadari bahwa yang namanya perempuan itu kiprahnya tidak seperti laki-laki. Ini juga menjadi tugas pemerintah dalam pemberdayaan perempuan itu harus dilaksanakan. Misalnya adanya pendidikan politik untuk perempuan. Kalau di PDI-P yang tidak mempunyai KTA juga bisa nyalon.”

Tidak mempunyai KTA berarti berasal dari non kader. Jadi biasanya, bagi calon-calon non-kader kemudian mengurus administrasi untuk memperoleh KTA dari partai. Proses untuk memperoleh KTA ini diperkirakan sekitar 2 bulan. Meskipun terdapat kendala dalam rekrutmen caleg perempuan, namun PDIP berhasil memenuhi persyaratan dalam pencalonan dengan jumlah calon perempuan sebesar 37% atau 18 calon dari total 49 calon yang tersebar di 6 daerah pemilihan. Di setiap daerah pemilihan masing-masing terdapat 3 calon perempuan.

...kami diminta oleh DPP untuk menaikkan kursi dari 10 menjadi 15. Apabila kami hanya mengharapkan dari caleg kemarin saja tidak mungkin, maka kami berusaha mencari kader pemula. Misalnya Ibu Muslimatun yang kami rekrut yang bukan merupakan kader. Tapi kami harus jeli melihat massa, dan financial. Kemudian lurah Triwidadi yang saya rekrut karena dianggap memiliki massa yang banyak. Padahal yang lurah-lurah itu tidak jadi caleg maka target kami tidak tercapai.¹⁷”

Dari wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa calon yang berasal dari luar kader, selain terdapat syarat-syarat tertentu, namun aspek popularitas, elektabilitas dan finansial menjadi pertimbangan penting dalam rekrutmen non-kader.

Dalam menentukan caleg, PDIP Kabupaten Sleman melakukan skoring terhadap bakal caleg yang meliputi beberapa aspek yaitu:

- Pengabdian terhadap partai
- Pendidikan
- Pengalaman jabatan
- Kompetensi, prestasi dan elektabilitas
- Kondite (factor pengurangan)

Aspek terakhir yaitu kondite, merupakan aspek pengurangan dalam arti kalau ternyata terdapat masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan kondite calon, maka calon yang bersangkutan skornya mengalami pengurangan karena terdapat kondite yang kurang baik di masyarakat.

¹⁷ *Ibid.*

Proses seleksi dalam partai dilakukan oleh beberapa orang yaitu:

- Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- Wakil Ketua Bidang organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen
- Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan antar lembaga DPC PDIP Kabupaten Sleman.

Meskipun hasil skoring tidak untuk diakses publik, namun caleg bisa mengetahui hasil skornya. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu caleg¹⁸:

Kalau saya yang kemarin itu masalah penyekoran kebetulan ada *incumbent*. Saya kalah dengan Pak Ramlan dan pengurus PAC, saya kalah dengan anak Minggir. Sebenarnya saya bisa dapat nomor 7 tapi kemudian saya memilih nomor yang paling bawah."

Setelah dilakukan pembobotan/skoring, kemudian ditentukan nomor urut caleg. Penentuan nomor urut didasarkan pada dua aspek yaitu jabatan bakal calon dalam struktur partai dan nilai bobot skoring bakal calon. Dari hasil pembobotan tersebut biasanya nomor urut 1 dan 2 diduduki oleh pengurus partai, nomor 3 oleh calon perempuan, dan nomor 4 dan seterusnya kemungkinan ditempati oleh calon-calon yang berasal dari luar kader.

¹⁸ Wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kabupaten Sleman, Bapak Supriyoko, 7 April 2016.

Tabel 4.3. Daftar Caleg PDIP Kabupaten Sleman dalam Pemilu 2014

No	Dapil Sleman 1	Dapil Sleman 2	Dapil Sleman 3	Dapil Sleman 4	Dapil Sleman 5	Dapil Sleman 6
1	Wiwik Supartini	Ir. L.N. Agus Rujito Nugroho	Luluk Harnawa	Ciptono Prasetyo	Sukarmin	Widarto Syahputra
2	Joko Purbadi	Aan Suharyono	Rajiyo	Suharyanto, S.Pd.	Haji Suprpto, SH, CN	Ramelan, SE
3	Ludikson Siringoringo	Dwi Yogamashita, S.Hut	R. Ngt. Heni Kusharyanti, S.IP	Ririn Sulastri	Sri Riyadimingsih, S.Pd	Ambarwati Hasanah
4	Haris Suhiharsa	Timbul Saptowo, ST	Sri Haryanti	Budi Sanyata	Agung Wibawanto, S.Pd	Bambang Sulaksono, ST
5	Danang Miharsa, SE	Susanto Raharjo	Antonius Suriatmono, BE	Dedie Kusuma, SE	Danang Wijanarka	Bayu Setiawan Yudi Putranto
6	Prabawati Yanuartiningsih	Rosalia Widyastuti	Andreas Purwanto	Suharyati	Diani Kartika	Suharti
7	Pipit Gunandari	Widarwati	Nila Rifianti, S.Pd.	H. Sunato, S.Sos.	Y. Gustan Ganda	Kukuh Tigo Manggolo
8		Sumono Hadi Susilo	Joko Susanto	Bianka Andriyani, SE	Dra. Hj. Muslimatun	Esti Karina
9				FX Kamidi		Supriyoko

Sumber: Diolah dari data KPUD Kabupaten Sleman

Dari tabel daftar caleg tersebut, hanya satu perempuan yang berada pada nomor urut 1, yaitu Wiwik Supartini. Selebihnya, caleg perempuan berada pada nomor urut 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam proses pencalonan belum menjadi aktor utama, dan lebih sebagai upaya untuk memenuhi kuota 30 % perempuan di parlemen. Meskipun nomor urut tidak lagi signifikan dalam sistem pemilu yang berdasarkan pada suara terbanyak, namun daftar caleg tersebut juga menunjukkan bahwa masih sedikit perempuan yang duduk dalam kepengurusan partai. Wiwik Supartini ditempatkan pada nomor urut 1 karena dia sebagai pengurus partai yaitu sebagai Bendahara DPC PDIP Kabupaten Sleman.

Selain itu, hal yang menarik dalam penentuan nomor urut caleg PDIP Sleman adalah caleg tidak lagi terlalu mempermasalahkan nomor urut. Hal ini karena sistem pemilu suara terbanyak memberikan peluang bagi setiap caleg untuk memperoleh suara, tidak tergantung kepada nomor urut atas. Bahkan di PDIP Kabupaten Sleman, apabila tidak mendapatkan nomor urut 1 atau 2, cenderung lebih memilih ditempatkan nomor urut terakhir, atau nomor urut 4. Nomor urut terakhir karena berpendapat bahwa nomor urut terakhir lebih mudah terlihat oleh pemilih, sedangkan nomor urut 4 karena sama dengan nomor urut partai yang berada pada nomor 4. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Salah satu anggota DPRD Sleman dari PDIP¹⁹:

Jadi begini, dalam nomor urut sistemnya adalah terbuka jadi nomor urut tidak menentukan kemenangan caleg. Tetapi nomor yang diprioritaskan adalah pengurus PAC dan fungsionaris partai DPC diprioritaskan untuk mendapat nomor urut 1. Waktu itu dengan alasan strategis dan alasan untuk memudahkan dalam berkampanye saya minta nomor urut 8, tetapi karena ada sesuatu hal dimana nomor 7 ada yang dicoret oleh KPU sehingga saya menjadi nomor 7. Karena pada tahun 2014 menggunakan sistem terbuka jadi sebenarnya penentuan nomor urut menjadi tidak penting, karena yang menjadi adalah yang memperoleh suara terbanyak. Berbeda jika sistem tertutup yang menjadi anggota legislatif pasti nomor urut 1. Kemarin berdasarkan banyak pertimbangan strategis bahwa banyak yang tidak memilih nomor urut 1 karena untuk posisi yang memiliki jabatan strategis di DPC. Bahkan banyak yang mencoba meminta nomor urut terakhir, karena dengan alasan strategis pada saat kampanye dan kemudahan pada waktu melihat kartu suara yang besar dan tulisannya sangat kecil. Maka paling baik adalah dengan memperoleh nomor urut atas atau paling bawah. Hal ini untuk menjamin kemudahan bagi para pemilih, karena nomor urut tengah justru terkadang tidak menjadi perhatian pemilih.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Gustan Ganda, anggota DPRD Kabupaten Sleman dari PDIP, 4 April 2016 di Angkringan Sleman Jl. Godean Utara, jam 20.30.

Lebih lanjut disampaikan bahwa:

kemarin itu urutannya PAC nomor 1, DPC, kemudian perempuan. Kemudian dilanjutkan lagi PAC Gamping, DPC kemudian perempuan. Jadi apabila PAC Melati memperoleh nomor urut 1 maka PAC Gamping mendapat nomor urut 4. Hal ini berlaku untuk dapil yang memiliki 2 kecamatan. Hal ini berbeda dengan dapil yang mempunyai kecamatan sebanyak 4 seperti dapil 6 Godean, Sayegan, Mayudan dan Minggir berdasarkan ranking. PAC mana yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 2009 pasti mendapat nomor urut 1, sementara yang memperoleh suara terbanyak kedua akan mendapat nomor urut 4, dan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pasti mendapat nomor urut 7²⁰.”

Dari wawancara tersebut, ternyata dalam PDIP, meski nomor urut menjadi tidak signifikan dalam sistem pemilu dengan suara terbanyak, namun nomor urut 1, nomor urut 4 dan nomor urut 7 menjadi pertimbangan dalam keterpilihan caleg. Nomor urut 1 terkait dengan kemudahan dalam pencoblosan bagi pemilih, nomor urut 4 menjadi pilihan karena sama dengan nomor urut partai, dan nomor urut 7 karena nomor urut 7 merupakan nomor urut terakhir dalam setiap dapil.

B. Proses Pemilihan oleh Masyarakat Melalui Pemilu

Setelah seleksi caleg yang dilakukan oleh PDIP mulai dari penjarangan, penyaringan, menyekoran dan penentuan nomor urut caleg, maka daftar caleg ditetapkan dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) dan dari DCS tersebut kemudian ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) setelah memperoleh respon dari masyarakat dan juga koreksi dari partai politik dan verifikasi yang dilakukan oleh KPUD. Daftar Calon Tetap PDIP Kabupaten Sleman seperti dalam Tabel 3.1. Dari daftar caleg yang ada, maka caleg yang terpilih seperti dalam tabel berikut:

²⁰ *Ibid.*

Tabel 4.4. Daftar Anggota DPRD Kabupaten Sleman Terpilih dalam pemilu 2014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO URUT	DAPIL	JABATAN DI PARTAI
1	Haris Sugiharta	L	4	Tempel	Bendahara
2	Danang Maharsa, SE	L	5	Sleman	Wakil Ketua Bid Pemuda dan Olah Raga
3	Dwi Yogamashita, S.Hut	P	3	Ngaglik	Wakil Ketua Bidang Petani
4	Timbul Saptowo, ST	L	4	Ngaglik	
5	Andreas Purwanto	L	6	Kalasan	
6	Nila Rafrianti, S.Pd.	P	7	Ngemplak	Wakil Ketua Bid. Perempuan dan Anak
7	Budi Sanyata	L	4	Depok	
8	H. Sunarto, S.Sos	L	7	Depok	
9	Y. Gustan Ganda	L	7	Gamping	Sekretaris
10	Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes	P	8	Mlati	Wakil Ketua Bid. Kesehatan
11	RB Ramelan, SE	L	2	Seyegan	
12	Bambang Sigit Sulaksono, ST	L	4	Godean	

Sumber: Olah Data

Dari daftar caleg yang terpilih tersebut menunjukkan bahwa nomor urut tidak signifikan dalam keterpilihan caleg. Bahkan dari daftar calon tetap, tidak satupun caleg dengan nomor urut 1 yang terpilih dalam pemilu. Tingkat keterpilihan caleg berdasarkan nomor urut seperti dalam table berikut:

Tabel 4.5. Tingkat keterpilihan caleg berdasarkan nomor urut di PDIP Kabupaten Sleman

NO Urut	Frekuensi Terpilih	Prosentase (%)
1	0	0
2	1	8,33
3	1	8,33
4	4	33,34
5	1	8,33
6	1	8,33
7	3	25,00
8	1	8,33
Jumlah	12	100

Sumber: Olah data

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat keterpilihan caleg dengan nomor urut sama dengan nomor urut partai mempunyai tingkat keterpilihan yang paling

tinggi yaitu 33,34 %. Hal ini karena lebih memudahkan pemilih dalam menentukan pilihannya di antara daftar calon yang cukup banyak. Dengan memilih partai Nomor 4 dan Calon Nomor 4 lebih memudahkan caleg dalam kampanye, dan juga memudahkan pemilih dalam pencoblosan. Oleh karena itu, nomor urut 4 menjadi nomor pilihan dari para caleg. Dari 6 Dapil yang ada, hanya 2 caleg yang tidak terpilih yaitu dari Dapil Sleman 3 dan Dapil Sleman 5.

Selain nomor urut 4 yang sesuai dengan nomor urut partai, pada PDIP Kabupaten Sleman, nomor urut 7 juga memperoleh peluang yang cukup besar yaitu 25 %. Hal ini lebih disebabkan nomor urut 7 merupakan nomor urut bawah (meski bukan terbawah), sehingga juga lebih mudah bagi pemilih dalam melakukan pencoblosan.

Tabel 4.6. Daftar Perolehan Caleg per Dapil

DAPIK	NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA	% PEROLEHAN SUARA PER DAPIL	RANKING PEROLEHAN SUARA PER DAPIL	KETERANGAN
SLEMAN 1	1	Wiwik Supartini	2,243	14.14	3	
	2	Joko Purbadi	1,064	6.71	4	
	3	Ludikson Siringoringo	268	1.69	5	
	4	Haris Suhilharsa	7,292	45.96	1	Terpilih (petahana)
	5	Danang Miharsa, SE	4,507	28.40	2	Terpilih
	6	Prabawati Yanuartiningsih	235	1.48	7	
	7	Pipit Gunandari	258	1.63	6	
SLEMAN 2	1	Ir. L.N. Agus Rujito Nugroho	2,216	11.06	4	
	2	Aan Suharyono	587	2.93	8	
	3	Dwi Yogamashita, S.Hut	3,638	18.16	2	Terpilih (petahana)
	4	Timbul Saptowo, ST	5,972	29.82	1	Terpilih (petahana)
	5	Susanto Raharjo	1,678	8.38	6	
	6	Rosalia Endang Widyastuti	1,021	5.10	7	
	7	Widarwati	1,679	8.38	5	
	8	Sumono Hadi Susilo	3,238	16.17	3	
SLEMAN 3	1	Luluk Harnawa	977	5.32	5	
	2	Rajjo	2,153	11.71	4	Petahana/tidak terpilih
	3	R. Ngt. Heni Kusharyanti, S.IP	649	3.53	6	
	4	Sri Haryanti	584	3.18	7	
	5	Antonius Surijatmono, BE	2,424	13.19	3	
	6	Andreas Purwanto	3,000	16.32	2	Terpilih
	7	Nila Rifianti, S.Pd.	8,104	44.09	1	Terpilih
	8	Joko Susanto	490	2.67	8	

DAPIK	NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA	% PEROLEHAN SUARA PER DAPIK	RANKING PEROLEHAN SUARA PER DAPIK	KETERANGAN
SLEMAN 4	1	Ciptono Dwi Prasetyo	1,092	5.83	7	
	2	Suharyanto, S.Pd.	1,239	6.62	6	
	3	Ririn Sulastri	1,008	5.38	8	
	4	Budi Sanyata	4,841	25.85	1	Terpilih
	5	Dedie Kusuma. SE	2,500	13.35	3	
	6	Suharyati	398	2.13	9	
	7	H. Sunato, S.Sos.	3,251	17.36	2	Terpilih
	8	Bianka Andriyani, SE	1,705	9.10	5	
	9	FX Kamidi	2,695	14.39	4	
SLEMAN 5	1	Sukarmin	2,624	13.83	5	
	2	Haji Suprpto, SH, CN	3,095	16.32	4	Petahana/tidak terpilih
	3	Sri Riyadiningsih, S.Pd	3,332	17.57	3	
	4	Agung Wibawanto, S.Pd	570	3.01	7	
	5	Danang Wijanarka	478	2.52	6	
	6	Diani Kartika	427	2.25	8	
	7	Y. Gustan Ganda	4,761	25.10	1	Terpilih
	8	Dra. Hj. Sri Muslimatun	3,681	19.41	2	Terpilih
SLEMAN 6	1	Widarto Catur Syahputra	1,573	8.96	5	
	2	Ramelan. SE	6,219	35.44	1	Terpilih (petahana)
	3	Ambarwati Hasanah	522	2.97	7	
	4	Bambang Sigit Sulaksono, ST	3,706	21.12	2	Terpilih
	5	Bayu Setiawan Yudi Putranto	310	1.77	8	
	6	Suharti	207	1.18	9	
	7	Kukuh Tigo Manggolo	1,743	9.93	4	

DAPIK	NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA	% PEROLEHAN SUARA PER DAPIL	RANKING PEROLEHAN SUARA PER DAPIL	KETERANGAN
	8	Esti K Arina	779	4.44	6	
	9	Supriyoko	2,490	14.19	3	
		TOTAL PEROLEHAN SUARA CALEG	109,523	75,72		
		PEROLEHAN SUARA PARTAI	35,113	24,28		
		TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI	144,636	100		

Sumber: Olah Data

Tabel 3.5. tersebut menunjukkan beberapa hal yaitu *pertama*; nomor urut atas tidak lagi signifikan dalam mempengaruhi perolehan suara. Memang nomor urut 1 cenderung memperoleh suara yang cukup banyak, namun tidak mampu mencapai satu kursi. Hal ini terkait dengan strategi PDIP dengan menempatkan pendatang baru (pertama kali sebagai caleg pada pemilu 2014) yang berasal dari pengurus Pimpinan Anak Cabang PDIP pada masing-masing dapil. Caleg dengan nomor urut 2, berasal dari pengurus DPC, sebagian besar memperoleh suara sekitar 6 sampai 35 %, namun hanya Ramelan dari Dapil 6 yang terpilih. Pada nomor urut 2, terdapat 3 caleg petahana, yaitu Rajiyo, Haji Suprpto dan Ramelan. Meskipun Rajiyo dan Haji Suprpto yang merupakan petahana memperoleh suara di atas 2000, namun kalah dibandingkan dengan caleg baru.

Kedua; Petahana dan caleg potensial ditempatkan pada nomor urut 4 sesuai dengan nomor urut partai. Dari 6 dapil, 4 dapil (67 %) terpilih menjadi anggota DPRD. Hanya dua dapil dengan nomor 4 yang tidak terpilih yaitu dapil Sleman 3 (Sri Haryanti) dan dapil Sleman 5 (Agung Wibawanto) yang tidak terpilih, bahkan perolehan suaranya kurang dari 5 % dari perolehan suara pada dapil yang bersangkutan.

Ketiga, dari 6 caleg petahana, 4 caleg terpilih kembali dan dua caleg tidak terpilih. Meskipun Rajiyo dan Haji Suprpto ditempatkan pada nomor urut 2, namun dikalahkan oleh caleg dengan nomor urut 7 dan 8. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa petahana tidak selalu dapat mempertahankan kursinya meskipun menempati nomor urut atas.

Keempat, dengan sistem pemilu yang berlaku saat ini, peran caleg dalam perolehan suara sangat besar. Dari total perolehan suara PDIP, 75,72% perolehan suara partai berasal dari caleg, dan hanya 24,28% yang memilih partai. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan pemilih dengan caleg lebih kuat daripada ikatan pemilih dengan partai politik, karena yang betul-betul memilih partai tanpa terpengaruh oleh caleg hanya 24,28%.

Dari hasil wawancara, terdapat dua faktor utama keterpilihan sebagaimana dikatakan oleh ketua DPC PDIP Kabupaten Sleman²¹:

Kalau kami tidak ada prioritas harus seseorang menjadi terpilih. Sementara yang namanya legislatif itu tidak bisa terlepas dengan dukungan dari masyarakat. Kalau orang baru memang sangat sulit karena karakter

²¹ Wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kabupaten Sleman, Op.Cit.

masyarakat yang sudah terlanjur pragmatis. Dengan karakter ini apabila caleg tidak pernah terjun ke masyarakat mana mungkin dia bisa jadi, kecuali dia memiliki uang banyak dan melakukan money politic. Masyarakat sekarang ini memang seperti itu, tetapi apabila dia bisa menjalin hubungan dengan masyarakat sebelum pelaksanaan pileg maka dia bisa mengalahkan yang namanya money politik.

Jadi, terdapat dua faktor penentu dalam keterpilihan caleg yaitu kiprahnya di dalam masyarakat, dan banyaknya uang yang dimiliki yang mengarah kepada money politics. Kiprah yang baik dalam masyarakat akan membawa persepsi positif bagi pemilih. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang caleg²²:

“Saya aktif di Kelompok tani di desa Donokerto karena saya berdomisili di sana, selain itu kita juga banyak melakukan pendampingan ke masyarakat mulai dari kelompok tani, kelompok ternak, perikanan, pendampingan dengan anak sekolah berupa dana pendidikan, kesehatan, rumah tidak layak huni. Dari kegiatan itu yang benar-benar kita lakukan untuk masyarakat. Kalau organisasi di partai saya memang tidak begitu banyak.”

“Strategi saya karena saya bukan orang yang memiliki banyak uang maka saya dekat dengan masyarakat itu melalui pendampingan itu tadi. Jadi maaf saya memang tidak jadi tetapi suara saya di Turi sangat tinggi, jadi ada kenaikan suara dari PDI-P yang cukup tinggi tanpa menggunakan uang karena pendampingan itu. Jadi tidak ada rasa di hati saya ini terus down. Saya bangga saja karena suara PDI-P di Turi cukup naik.”

Sementara itu, modal uang yang banyak juga berpotensi untuk memperoleh dukungan publik. Apalagi sebagian masyarakat jelas-jelas bersedia untuk memberikan pilihannya berdasarkan uang yang diberikan. Bahkan di beberapa kampung terdapat spanduk yang menyatakan bahwa di wilayahnya menerima ‘serangan fajar’ yang merupakan salah satu manifestasi politik uang. Kuatnya politik uang itu sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang caleg:

“Karena uang, punya duit dan beli. Karena saya itu kalah di Sleman saja di mana dapil 1 itu terdiri dari Tempel, Turi dan Sleman dan saya kalah suara itu di Sleman murni itu karena kalah di duit aja. Jadi tidak usah ditutup-tutupi saya kalahnya itu karena duit.”²³

Meskipun tidak ada informasi yang valid mengenai jumlah dana yang dikeluarkan oleh masing-masing caleg, namun faktor dana ini cukup menentukan. Dan antara kedua faktor tadi ada korelasi negatif, dalam arti semakin besar

²² Wawancara dengan Ibu Supartini, caleg perempuan dari PDIP tanggal 8 April 2016. Ibu Supartini berada pada nomor urut 1, namun tidak terpilih menjadi anggota DPRD.

²³ *Ibid.*

kiprahnya dalam masyarakat dan semakin dikenal masyarakat. semakin kecil dana yang dibutuhkan. Dan sebaliknya, semakin kecil kiprahnya dalam masyarakat, semakin banyak dana yang dibutuhkan. Hal ini karena masyarakat semakin pragmatis dan sebagian merupakan pemilih dengan rasionalitas ekonomi jangka pendek yang bdipertemukan dengan dengan adanya dana dengan konsekuensi pilihan yang diarahkan oleh si pemilik uang. Uang sebagai salah satu alat untuk membeli suara, atau uang sebagai alat untuk dikenal oleh masyarakat.

Tabel 4.7. Daftar Caleg Terpilih berdasar Perolehan Suara

No.	Nama	Umur Saat Pencalonan	Perolehan Suara	Keterangan
1.	Nila Rifianti, S.Pd.	30 tahun	8,104	
2.	Haris Sugiharsa	45 tahun	7,292	Petahana
3.	Ramelan, SE	57 tahun	6.219	Petahana
4.	Timbul Saptowo, ST	40 tahun	5,972	Petahana
5.	Budi Sanyata	47 tahun	4,841	
6.	Y. Gustan Ganda	38 tahun	4,761	
7.	Danang Miharsa, SE	37 tahun	4,507	
8.	Dra. Hj. Sri Muslimatun	61 tahun	3,681	
9.	Bambang Sigit Sulaksono, ST	48 tahun	3.706	
10.	Dwi Yogamashita, S.Hut	42 tahun	3,638	Petahana
11.	H. Sunarto, S.Sos.	56 tahun	3,251	
12.	Andreas Purwanto	41 tahun	3,000	

Sumber: Olah Data

Calon petahana biasanya diuntungkan, bukan saja karena sudah dikenal publik, namun juga bisa mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan masyarakat, meskipun tidak semua caleg petahana terpilih kembali. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa caleg petahana memperoleh dukungan yang cukup tinggi dari pemilih. Tiga caleg petahana yaitu Haris Sugiharsa, Ramelan dan Timbul Saptowo memperoleh suara nomor 2, 3 dan 4 tertinggi dari seluruh caleg PDIP yang terpilih. Namun yang menarik dari tabel tersebut adalah bahwa perolehan suara tertinggi justru diperoleh oleh seorang caleg termuda, perempuan. Nila Rifianti dari dapil Sleman 3.

C. Pengaruh Sistem Pemilu

Sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak mempengaruhi mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik. Partai politik tidak hanya merekrut kader-kadernya saja, namun rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan memberi peluang kepada calon yang berasal dari non-kader. Pertimbangan dalam memilih calon yang berasal dari non kader didasarkan atas pertimbangan popularitas, elektabilitas dan finansial, karena faktor tersebut yang akan mendongkrak perolehan suara partai politik. Apalagi dalam pemilu 2014, kuota 30 % perempuan merupakan hal yang wajib dipenuhi dalam setiap dapil, sehingga sistem rekrutmen yang terbuka justru menguntungkan partai dalam menjaring caleg-caleg perempuan.

Dalam sistem pemilu dengan suara terbanyak, kompetisi antar caleg menjadi bebas, dalam arti partai tidak bisa memberikan prioritas yang akan dipilih karena semua tergantung kepada preferensi pemilih. Kalau dalam sistem proporsional tertutup (bukan suara terbanyak), nomor urut menjadi penting. Nomor urut merupakan kebijakan partai untuk menentukan calon-calon yang menjadi prioritas partai. Oleh karena itu, posisi nomor urut 1 dan 2 merupakan posisi strategis untuk terpilih dalam pemilu. Namun karena dengan sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak, nomor urut atas tidak lagi relevan, maka partai juga menggunakan strategi-strategi baru dalam proses pencalegan dan penentuan nomor urut. Ada 3 pilihan nomor urut yang memberikan peluang terpilih karena memudahkan pilihan publik yaitu nomor urut atas (1 dan 2), nomor urut bawah (dua nomor terbawah) dan nomor urut sesuai dengan nomor partai politik. Dalam kasus PDIP, selain nomor urut 1 dan 2 yang diprioritaskan bagi pengurus partai, namun caleg justru memilih ditempatkan pada nomor urut sesuai dengan nomor partai (nomor 4) dan nomor bawah. Dalam realitasnya, tingkat keterpilihan pada nomor urut sesuai dengan nomor urut partai dan nomor urut bawah mempunyai tingkat keterpilihan yang tinggi. Hal ini ternyata karena incumbent dan pengurus partai memilih untuk berada pada nomor urut 4. Sedangkan nomor urut bawah biasanya ditempati oleh caleg-caleg baru namun mempunyai popularitas yang cukup tinggi sehingga peluang terpilih menjadi lebih besar.

Dalam sistem pemilu yang berlaku, kontribusi suara dari caleg cukup besar, sehingga dukungan masyarakat lebih didasarkan atas caleg, sedangkan dukungan yang murni kepada partai politik hanya sebesar 24,28%. Hal ini memperkuat tesis

dari Mainwaring maupun Reuven Hazan bahwa sistem pemilu dengan suara terbanyak memberikan peran yang besar kepada calon, sehingga dukungan kepada partai lebih ditentukan oleh dukungan kepada calon. Dalam perspektif teoritik, sistem pemilu yang berbasis pada calon akan melemahkan ikatan calon dengan partai politik. Calon yang lebih menentukan dalam proses pemilu dan dalam memperoleh dukungan publik, sehingga melemahkan control partai terhadap calon. Namun hal ini ditampik oleh Ketua DCP. Menurut ketua DPC PDIP Kabupaten Sleman, tidak ada permasalahan dengan control partai terhadap anggotanya di DPRD. Partai tetap bisa mengontrol anggotanya di DPRD karena partai mempunyai mekanisme rapat rutin yang dilakukan secara periodik²⁴. Mekanisme rapat rutin tersebut sebagai mekanisme komunikasi antara partai dengan orang-orangnya di DPRD sekaligus sebagai upaya partai dalam mengontrol loyalitas anggota kepada partai.

Meskipun partai menyatakan bahwa tidak ada perasalahan terhadap kontrol partai terhadap orang-orangnya di DPRD, namun dalam realitasnya muncul permasalahan-permasalahan tersebut. Dalam kasus pilkada misalnya, keputusan DPP PDIP adalah mengusung pasangan Yuni Satya Rahayu-Danang yang merupakan koalisi antara PDIP dengan Gerindra. Namun Sri Muslimatun sebagai anggota DPRD dari PDIP justru mencalonkan sebagai Wakil Bupati yang diusung oleh partai lain. PDIP menentang pencalonan Sri Muslimatun, namun Sri Muslimatun tetap maju sebagai calon Wakil Bupati dan justru mengalahkan pasangan yang diusung oleh PDIP. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mekanisme rekrutmen terbuka dan sistem pemilu yang berbasis pada calon memberikan peluang bagi calon yang bukan kader partai untuk terpilih, dan hal ini menyulitkan partai dalam mengontrolnya. Meskipun Sri Muslimatun menjadi anggota DPRD dari PDIP dan kemudian diangkat/dipilih menjadi pengurus partai, dalam kenyataannya, ikatannya dengan partai sebatas dalam pemilu saja.

“Sudah dipercaya, malah sekarang meninggalkan PDIP. Ini jelas merupakan suatu bentuk pengkhianatan”, seperti diungkapkan oleh salah satu pengurus PDIP. Sri Muslimatun telah melanggar keputusan DPP dalam pilkada. Selain Sri Muslimatun, dalam kinerja DPRD, terdapat dua anggota DPRD Kabupaten Sleman yang berasal dari PDIP yang dianggap indisipliner karena tidak memenuhi

²⁴ Wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kabupaten Sleman, *Op.Cit.*

kehadiran dalam sidang-sidang DPRD, yaitu Danang Miharsa dan Andreas Purwanto. Andreas Purwanto, Danang Miharsa dan Sri Muslimatun berasal dari nomor urut bawah dalam proses pencalonannya. Ketiganya dipanggil oleh Badan Kehormatan DPRD karena dianggap indisipliner²⁵. Meskipun pemanggilan terhadap anggota DPRD dari PDIP tersebut dilakukan oleh Ketua BK DPRD dan bukan oleh pimpinan partai, namun tindakan indisipliner tersebut menunjukkan kinerjanya sebagai anggota DPRD dan juga menunjukkan kinerja partai di DPRD.

²⁵ Kinerja Anggota DPRD, BK panggil Tiga Anggota Dewan. salah satunya Wabup Terpilih, dalam *harianjogja.com*, tanggal 12 Januari 2016, diakses tanggal 9 September 2016.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam sistem pemilihan proporsional terbuka keterpilihan caleg dalam pemilu lebih ditentukan oleh popularitas, elektabilitas dan kemampuan finansial caleg daripada faktor pengalaman dan loyalitas kepada partai politik yang biasanya ditempatkan pada nomor urut atas. Namun karena nomor urut tidak lagi relevan, hal ini disiasati oleh PDIP dengan memilih alternatif nomor urut atas (no. 1 dan 2), nomor sesuai dengan nomor partai (no. 4) dan nomor urut bawah (dua terbawah) untuk memudahkan kampanye dan pencoblosan oleh pemilih.
2. Dalam sisten pemilihan proporsional terbuka, calon-calon non kader memiliki peluang yang sama untuk terpilih, meskipun mereka tidak aktif sebagai pengurus partai politik.
3. Caleg perempuan belum mencerminkan kualitas yang diharapkan, lebih banyak untuk memenuhi persyaratan quota pencalonan sebanyak 30%.
4. Hasil penelitian ini memperkuat thesis dari Mainwaring maupun Reuven Y Hazan bahwa sistem pemilu proporsioonal dengan suara terbanyak (berbasis pada calon) menyebabkan longgarnya ikatan loyalitas antara calon terpilih dengan partai politik. Apalagi sistem pemilu ini memberikan peluang yang sama bagi calon yang bukan kader sehingga ikatannya dengan partai politik relatif lebih longgar, dan partai sulit untuk melakukan kontrol terhadap anggotanya di DPRD.

Saran

1. Partai perlu terus melakukan kaderisasi dan peningkatan kapasitas kader sehingga tidak kesulitan dalam melakukan rekrutmen politik, terutama untuk kader perempuan.
2. Partai perlu mengatur mekanisme yang lebih baik secara internal terkait dengan lemahnya ikatan anggotanya di DPRD dengan partai politik sehingga partai tetap bisa menjaga loyalitas dan komitmen anggotanya untuk kepentingan partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Hazan, Reuven Y dan Gideon Rahat, 2010, *Democracy within Parties, Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*, Oxford University Press, New York.
- Creswell, J, dan Plano Clark, 2011 *Designing and Conducting Mix Methods Research*, Sage Publications.
- Mainwaring, 1990: *Politicians, Parties and electoral System: Brazil in Comparative Perspective*, working paper, Kellogg Institute.
- Katz, Richard. S dan William Crotty, *Handbook of Party Politics*, London: Sage Publications
- Norris, Pippa, 1997, *Passages to Power, Legislative Recruitment in Advanced Democracies*, Cambridge University Press, 1997.
- Pennings, Paul dan Reuven Y Hazan, 2001, Democratizing Candidate Selection, Causes and Consequences, dalam jurnal *Party Politics*, Vol. 7 No. 3, pp. 267-275, Sage Publications
- Purwaningsih, Titin, 2015, *Politik Kekerabatan dalam Politik Lokal di Sulawesi Selatan, Studi tentang Rekrutmen Politik pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Siavelis, Peter M dan Scott Morgenstern, 2008, *Pathways To Power, Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America*, The Pennsylvania University Press.
- Party Politics*, Sage Publications, Vol. 7 No. 3 tahun 2001